

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berbentuk kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki jumlah pulau sebanyak 17.000 yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Hal tersebut menjadikan wilayah Indonesia terpisah menjadi beberapa daerah dan pulau-pulau. Kondisi itulah yang melatarbelakangi Indonesia menganut sistem kesatuan dalam mengelola negara, dengan tujuan meskipun wilayah Indonesia terpisah menjadi beberapa pulau namun tetap bersatu, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam, selain itu Indonesia juga dianugrahi kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam bukan hanya seperti emas, minyak bumi, gas alam dan berbagai bentuk pertambangan lainnya, melainkan kekayaan alam juga seperti keadaan geografis yang mempesona serta masih alami di berbagai penjuru negeri. Dengan adanya kekayaan budaya dan pesona alam yang melimpah tersebut merupakan potensi yang besar untuk dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Indonesia. Salah satu potensinya yaitu dalam bidang pariwisata.

Kekayaan budaya serta pesona alam yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar di bidang pariwisata. Akan tetapi pariwisata di Indonesia dapat dikatakan tidak terlalu berkembang. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi Indonesia dalam sektor pariwisata, antara lain yakni masih adanya peraturan yang tumpang

tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, serta kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup (Nugroho SBM, 2020). Dari segi kunjungan wisatawan juga mayoritas masih di dominasi oleh wisatawan lokal. Hal tersebut menjadikan Indonesia menempati urutan keempat dalam hal jumlah kunjungan wisatawan asing yang berwisata di negara-negara ASEAN yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Negara ASEAN

Ranking	Negara	2019	2020
1	Thailand	39.800.000	6.700.000
2	Malaysia	20.100.000	4.300.000
3	Vietnam	18.000.000	3.840.000
4	Indonesia	16.110.000	4.020.000
5	Singapura	15.900.000	2.740.000
6	Filipina	8.000.000	1.320.000

Sumber : *REPUBLIKA.id, 2021*

Data tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia masih kalah dengan negara-negara seperti Thailand sebagai negara dengan jumlah pengunjung wisatawan mancanegara terbanyak, yaitu sebanyak 39.800.000 pengunjung. Disusul oleh Malaysia sebanyak 20.100.000 pengunjung, dan Vietnam sebanyak 18.000.000 pengunjung. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 16.110.000 pengunjung. Akan tetapi kondisi pandemi pada awal tahun 2020 berdampak langsung dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di beberapa negara ASEAN.

Berbagai permasalahan tersebut tentu tidak membuat pemerintah diam saja, pemerintah terus berupaya untuk dapat memanfaatkan potensi pariwisata serta

mengembangkan pariwisata di Indonesia. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan pembangunan pariwisata beserta dengan infrastruktur penunjang pada beberapa daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata. Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia adalah melalui UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Adanya peraturan tersebut menjadikan implementasi kebijakan mengenai pengembangan pariwisata memiliki payung hukum yang jelas, terutama bagi pemerintah daerah agar dapat menjalankan program mengenai pengembangan pariwisata di daerah.

Peraturan tersebut diharapkan mampu mendorong daerah-daerah dengan potensi pariwisata yang besar untuk dapat dikembangkan serta dikelola secara mandiri. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pariwisatanya ialah pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang biasa dikenal dengan julukan “Bumi Serasi” ini terletak di daerah yang strategis, yakni berada di jalur utama Semarang-Solo/Yogyakarta (JOGLOSEMAR) yang merupakan jalur padat dan banyak dilewati orang. Jika dilihat secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500m diatas permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 21°C s/d 28°C, sehingga menjadikan daerah Kabupaten Semarang memiliki pesona alam yang indah dan asri. Pemandangan alam seperti pegunungan-pegunungan banyak di jumpai di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, seperti Gunung Ungaran yang tampak jelas dilihat dari kota Ungaran yang merupakan pusat kota Kabupaten Semarang. Pesona alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang

diantaranya yakni curug/air terjun, hamparan hutan yang luas, pemandangan alam yang indah serta keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah.

Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang tidak seimbang dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang dalam 2 tahun terakhir dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membatasi segala kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan diterbitkannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Akibatnya banyak fasilitas-fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan akhirnya ditutup, seperti beberapa obyek pariwisata di Kabupaten Semarang. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Semarang

Tahun	Jumlah Pengunjung		
	Domestik	Asing	Total
2021	1.451.670	217	1.451.887
2020	1.872.938	856	1.873.794
2019	3.502.719	7.561	3.510.280
2018	3.372.781	8.999	3.381.780
2017	2.812.554	9.867	2.822.421

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021

Berdasarkan data dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang terbanyak adalah pada tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi, yakni sebanyak 3.510.280 wisatawan. Kemudian

pada 2 tahun terakhir kunjungan wisatawan mengalami penurunan hampir 50%, menjadi 1.873.794 pada tahun 2020 dan 1.451.887 pada tahun 2021. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak terlepas karena adanya pandemi Covid-19, yang juga berdampak pada tidak tercapainya target jumlah kunjungan wisatawan.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Jumlah Wisatawan Kabupaten Semarang

Tahun	Jumlah Pengunjung	
	Target	Realisasi
2021	3.175.015	1.451.887
2020	3.084.300	1.873.794
2019	3.023.824	3.510.280
2018	2.248.967	3.381.780
2017	1.855.331	2.822.421

Sumber : RKPD, Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat perbandingan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 realisasi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi pada tahun 2020 dan 2021 jumlah kunjungan wisatawan masih jauh dari target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 sedang terjadi pandemi, namun target untuk kunjungan wisatawan masih tergolong tinggi dan tidak ada penyesuaian. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Seksi Promosi Pariwisata bahwasanya :

“Memang kita perencanaan melalui RKPD, tiap tahun kita bikin itu untuk target tiap tahunnya. Memang selama pandemi target kunjungan wisatawan tidak ada penyesuaian, kita masih mengikuti target tersebut. Tetapi itu untuk targetnya lho ya, nanti kan realisasinya kita menyesuaikan karena pandemi. Jadi nanti realisasinya itu yang kita laporkan, tentunya dengan berbagai alasan seperti kondisi pandemi.”

Akibat dari menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan tidak tercapainya target kunjungan wisatawan, berimbas langsung terhadap menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Semarang di sektor pariwisata. Padahal sektor pariwisata merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar ketiga dalam beberapa tahun terakhir, sebelum adanya pandemi covid-19. Berdasarkan tabel berikut, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp. 93.165.271.609. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 pendapatan dari sektor pariwisata menurun cukup drastis, menjadi Rp. 34.369.204.021 dan Rp. 17.229.195.444.

Tabel 1. 4 Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata

Tahun	Pendapatan Daerah
2021	Rp. 17.229.195.444
2020	Rp. 34.369.204.021
2019	Rp. 93.165.271.609
2018	Rp. 350.922.310.812
2017	Rp. 407.123.301.240

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, tidak tercapainya target kunjungan wisatawan, serta menurunnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Agar potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sehingga Kabupaten Semarang dapat menjadi daerah tujuan wisatawan untuk berwisata.

Disinilah peran pemerintah daerah sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata, karena sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana dan tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk mengembangkan pariwisata adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Kebijakan pengembangan pariwisata tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, untuk jangka waktu 5 tahun.

Kebijakan pengembangan pariwisata daerah dalam penelitian ini berupa obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengembangan obyek wisata ini diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi pengembangan suatu kawasan destinasi pariwisata. Obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi kawasan Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, kawasan Bukit Cinta dan Palagan Ambarawa. Akan tetapi peneliti berfokus pada pengembangan pariwisata di obyek wisata Palagan Ambarawa. Pemilihan obyek wisata tersebut dikarenakan Palagan Ambarawa merupakan obyek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit dalam 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 5 Jumlah Pengunjung pada Obyek Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata

Obyek Wisata/UPTD	Jumlah Pengunjung (Tahun)					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
Candi Gedong Songo	1.146.192	2.332.458	680.915	321.071	150.375	4.631.011
Pemandian Muncul	419.955	532.008	173.742	29.546	42.323	1.197.574
Bukit Cinta	144.114	177.519	0	138.731	61.308	521.672
Palagan Ambarawa	125.553	149.586	41.476	12.248	567	329.430

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021

Pariwisata di Kabupaten Semarang khususnya pada Obyek Wisata palagan Ambarawa dapat dikatakan belum berkembang, jika dilihat dari pencapaian-pencapaian selama 5 tahun terakhir ini. Hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Bahwa pemerintah Kabupaten Semarang telah menyediakan anggaran untuk pengembangan pariwisata seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 6 Anggaran Belanja Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Anggaran Pengembangan Pariwisata
2021	Rp. 15.003.993.500,00
2020	Rp. 4.697.281.000,00
2019	Rp. 23.696.026.000,00
2018	Rp. 16.121.695.000,00
2017	Rp. 11.310.300.000,00

Sumber : Rancangan APBD Kabupaten Semarang tahun 2017-2021

Selain dengan menyediakan anggaran untuk pengembangan pariwisata, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah dengan

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Pada pasal 2 ayat (4) dijelaskan bahwa visi pembangunan pariwisata adalah “Terwujudnya Kabupaten Semarang sebagai destinasi wisata unggulan, berdaya saing dan ADEM (Asri, Dinamis, Ekologis, Mandiri)”. Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa misi pembangunan pariwisata Kabupaten Semarang yang terdapat dalam pasal 2 ayat (5) yakni dengan mengembangkan destinasi pariwisata berikut dengan fasilitas penunjangnya, serta mengembangkan pemasaran/promosi pariwisata di Kabupaten Semarang secara efektif dan efisien guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Sementara itu pada pasal 2 ayat (7) menjelaskan bahwa sasaran dari Perda Nomor 8 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas dan rata-rata lama tinggalnya;
- b. meningkatnya pendapatan masyarakat;
- c. meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;

Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang. Terlebih lagi saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, yang memaksa dibatasinya segala aktivitas dan kegiatan masyarakat serta ditutupnya beberapa fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang mengalami penurunan serta menurunnya pendapatan daerah dari pariwisata. Maka dari itu muncul pertanyaan

penelitian, **bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyikapi penurunan jumlah wisatawan pada saat pandemi Covid-19 ?**

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk memilih Kabupaten Semarang sebagai lokasi penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Sudah adanya alokasi anggaran untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, namun pariwisata di Kabupaten Semarang masih belum berkembang.
2. Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan daerah. Tidak terealisasinya target jumlah kunjungan wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Semarang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19 ?

2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan, yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dalam upaya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama pandemi Covid-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai media untuk menambah dan memperluas pengalaman yang diperoleh dari penelitian lapangan. Sehingga penulis mendapatkan wawasan tambahan dalam berpikir terutama dalam menganalisis mengenai implementasi suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang.

2. Manfaat bagi Pemerintah Daerah

Manfaat penelitian ini bagi Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya kepada Dinas Pariwisata adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

hal upaya-upaya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Selain itu juga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Semarang untuk lebih memajukan sektor pariwisata.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan sumber pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya bagi ilmu administrasi publik dalam proses implementasi kebijakan. Serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti suatu kajian yang sama.

4. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dan menambah wawasan bagi pembaca tentang implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.

1.6. Kajian Teori

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata yang sebelumnya banyak dilakukan di Indonesia. Adapun kesamaan tema yang penulis baca bersumber dari jurnal/penelitian-penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 7 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode	Teori	Hasil Penelitian
1	(Afni & Pambudi, 2017) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo”.	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum tercapainya ke empat kelompok variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu: (1) Sumber daya anggaran dan prasarana yang belum memadai, (2) Belum adanya peraturan khusus yang mengatur pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo, (3) Belum adanya komitmen yang kuat dari keseluruhan pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata. Meskipun beberapa indikator belum terpenuhi, masih terdapat satu indikator yang sudah dilaksanakan dengan baik yaitu: Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
2	Delly, dkk (2019) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu”	Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan Pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu, serta mengetahui kendala-kendala dalam mengimplementasikan kebijakan	Deskriptif Kualitatif.	Teori implementasi Kebijakan Van Metter & Van Horn	Hasil penelitian ini menjelaskan hasil implementasi kebijakan pengembangan pariwisata kawasan Pantai Panjang kota Bengkulu di Dinas Pariwisata kota Bengkulu. Kerja sama dengan instansi terkait selalu dikomunikasikan oleh Dinas Pariwisata kota Bengkulu dalam pengelolaan Pantai Panjang agar Bengkulu dalam Mewujudkan Program Wonderful Bengkulu 2020.

3	(Munir et al., 2019) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok”	Untuk memberikan gambaran kebijakan serta implementasi dari kebijakan kepariwisataan pengembangan pariwisata di Pulau Lombok.	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Berdasarkan hasil analisis kebijakan pengembangan pariwisata di pulau Lombok tidak terlepas dari empat pilar pariwisata yang termuat dalam peraturan daerah yakni pengembangan pariwisata, pemasaran, industri dan kelembagaannya. Implementasi dari kebijakan tersebut belum secara maksimal memberikan efek peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di Pulau Lombok, bahkan menimbulkan persoalan-persoalan baru dimasyarakat bawah.
4	(Qodriyatun, 2019) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa”	Untuk mengetahui implementasi kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Karimunjawa dilihat dari sudut pandang penyusun kebijakan, pelaksana kebijakan, dan <i>target group</i> (masyarakat Karimunjawa).	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Soren C. Winter	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Karimunjawa belum berkelanjutan. Karena meskipun secara ekonomi telah membuka lapangan kerja baru dan menambah penghasilan di masyarakat, namun secara sosial telah terjadi perubahan nilai dalam masyarakat dan secara ekologis telah terjadi kerusakan lingkungan.
5	(Widyanarko, 2020) “Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo”	Untuk mengetahui berjalannya kebijakan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan serta berjalan secara berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo.	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dengan belum optimalnya penerapan unsur-unsur implementasi kebijakan seperti Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, serta Struktur birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo.

6	(Ekel, 2020) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan”	Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis agrowisata di Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan.	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Hasil penelitian diperoleh fakta bahwa para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding mengalami kesulitan modal untuk menggarap perkebunan mereka karena bantuan yang diberikan pemerintah sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk biaya penggarapan kebun terpaksa mereka harus meminjam uang dari bank melalui program kredit usaha rakyat (KUR) untuk itu mereka meminta komitmen pemerintah untuk dapat menyalurkan bantuan kepada para petani agar mereka memperoleh kemudahan dalam pengembangan produksi hasil pertanian mereka. Para petani hortikultura di Kecamatan Modoinding juga berharap kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kepada para petani mengenai cara bercocok tanam yang baik dan modern agar kualitas tanaman terutama sayur – mayur dapat ditingkatkan dan mencapai standar yang lebih baik seperti kentang Modoinding yang kualitasnya sudah terkenal dimana – mana.
7	(Feki Lahamadi, Martha Ogotan, 2015) “Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di	Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata serta pengelolaan objek wisata yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Pulau Kumo.	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara belum dapat menggali dan mengelola objek wisata Pantai Kumo dengan baik karena dikatakan terdapat berbagai faktor yang menghambat pengambil kebijakan dan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Pulau Kumo. Selain itu terlihat pada birokrasi pemerintah yang kerap kali disepelekan dan hal ini membuat pengembangan

	Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara)”				objek wisata di Pantai Kumo kurang berkembang.
8	(Pallewa, 2016) “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara”	Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara	Deskriptif Kualitatif.	Teori Implementasi Kebijakan Charles Edward III	Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Toraja Utara, menggunakan tolak ukur teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, meliputi Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, secara keseluruhan belum berjalan dengan optimal dalam implementasi kebijakan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara.
9	(Irawan, 2017) “ <i>Implementation Of Tourism Sector Development Policy Through Demarketing In Improving Sme In Banyuwangi</i> ”	Untuk mengetahui implementasi kebijakan pariwisata di Banyuwangi dan dampak kebijakan tersebut terhadap sektor UKM.	Deskriptif Kualitatif.		Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan perencanaan dan pelaksanaan program kepariwisataan di Banyuwangi meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata; pariwisata dan pemasaran telah dijalankan dengan lebih baik. Penerapan strategi demarketing membawa dampak positif bagi kelestarian alam, sehingga konsep pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dapat terwujud. Selain itu, berdasarkan data UKM perdesaan, lokasi

					wisata menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Strategi demarketing tersebut berhasil mendukung potensi UKM untuk berkembang di Banyuwangi.
10	(Wicaksana, 2019) <i>“Policy Of Tourism Development In Sawarna Village Lebak District Banten Province”</i>	Untuk melihat implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Sawarna, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.	Deskriptif Kualitatif	Teori implementasi Kebijakan Van Metter & Van Horn	Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lebak menghadapi kendala utama yaitu: keterbatasan SDM pariwisata baik secara kuantitas maupun kualitas (kompeten dan profesional); kondisi infrastruktur (sarana dan prasarana) yang kurang baik terutama akses jalan dan jaringan transportasi menuju destinasi wisata sehingga mempengaruhi kinerja sektor pariwisata; koordinasi lintas instansi dan lintas pelaku yang belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, khususnya pada obyek wisata Palagan Ambarawa. Sehingga dari adanya penelitian-penelitian dengan fokus yang sama di atas dapat digunakan sebagai rujukan/referensi dalam melakukan penelitian ini nantinya. Selain itu juga untuk menunjukkan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dengan fokus yang sama.

1.6.2. Administrasi Publik

Kata administrasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala kegiatan dan usaha seperti penetapan tujuan serta kegiatan penetapan prosedur penyelenggaraan organisasi. Jika dilihat secara etimologis kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang meliputi kegiatan mengatur manusia, harta & benda, serta informasi, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai (Damai Darmadi Sukidin, 2009:4). Sedangkan kata publik adalah sebuah serapan dari bahasa Inggris (*public*), yang memiliki dua makna. Pertama, publik sebagai kata benda yang berarti sebuah komunitas yang memiliki kepentingan yang sama. Kedua, publik sebagai kata sifat yang berarti memiliki kaitan yang erat dalam kaitannya dengan suatu aktivitas yang menyangkut kepentingan banyak orang/masyarakat (Leo Agustino, 2016:7).

Waldo (dalam Pasolong, 2014:8) mengartikan administrasi publik sebagai suatu organisasi dan manajemen yang di dalamnya terdiri dari manusia dan peralatan untuk mencapai sebuah tujuan. Berbeda dengan sebelumnya, Edward H. Litchfield (dalam Inu Kencana Syafie 2010:25) memandang administrasi publik

sebagai sebuah ilmu untuk mengetahui seperti apakah suatu organisasi pemerintahan digerakkan, dipimpin serta dijalankan.

Kedudukan administrasi publik dalam sebuah negara yaitu sebagai pemberi pelayanan kepada publik (masyarakat), sehingga membuat administrasi publik menjadi salah satu hal yang krusial dalam pelaksanaan kenegaraan. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:24) mengartikan Administrasi Publik sebagai berikut :

1. Merupakan sebuah hubungan kolaborasi antar lingkungan pemerintahan.
2. Dalam administrasi Publik terdiri dari tiga sub kekuasaan pemerintahan; antara lain yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.
3. Administrasi Publik adalah wujud dari sistem politik, karena memiliki peranan yang penting dalam menentukan serta menyusun kebijakan.
4. Administrasi Publik berkaitan erat dengan beragam bentuk kelompok bisnis maupun perseorangan dalam memberikan layanan publik ke masyarakat.
5. Pada beberapa hal administrasi publik memiliki perbedaan penafsiran jika dibandingkan dengan administrasi perorangan.

Berbagai pendapat menurut ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik ialah sebuah studi yang mempelajari tentang segala urusan organisasi, yang dijalankan oleh manusia dan dibantu dengan berbagai peralatan penunjang yang kemudian bisa diterapkan dalam pemerintahan guna menggapai tujuan secara efektif serta efisien. Oleh sebab itu administrasi memiliki peran yang penting di kehidupan sehari-hari, seperti pada segala aktivitas organisasi. Dengan

adanya administrasi maka sebuah organisasi dapat menjalankan segala aktivitasnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti halnya pada negara Indonesia yang merupakan suatu organisasi besar, maka organisasi tersebut perlu dikelola melalui berbagai kegiatan administrasi, dimana kendali dipegang oleh pemerintah. Maka administrasi disini berperan untuk mencapai tujuan negara, yang salah satunya yaitu untuk mensejahterakan rakyat dengan melalui kebijakan.

1.6.3. Kebijakan Publik

Sebagai negara kesatuan yang menganut paham demokrasi, tentunya kebijakan selalu menjadi suatu komponen utama dalam membangun negara Indonesia. Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam (Dwiyanto Indiahono 2009:17) merupakan bentuk aksi nyata yang berorientasi pada tercapainya suatu tujuan yang telah disusun sebelumnya, baik yang dibuat oleh suatu individu, suatu kelompok ataupun pemerintah pada suatu wilayah guna menyelesaikan masalah serta menemukan kesempatan dalam menggapai suatu tujuan tersebut. Sedangkan James E. Anderson dalam (Dwiyanto Indiahono 2009:17) memaknai kebijakan bagaikan suatu tindakan dari beberapa pihak yang berkepentingan (seperti pejabat birokrat, kelompok tertentu, serta pemerintah) pada suatu kegiatan tertentu dalam pemerintahan. Jika melihat fenomena mengenai kebijakan selalu tidak terlepas dari adanya kaitan dengan kepentingan antar kelompok, tidak hanya di tingkat pemerintahan namun kebijakan juga pada tingkat masyarakat secara luas.

Pengertian publik menurut Denhard dan Denhard dalam (Dwiyanto Indiahono 2009:13) ialah seluruh warga negara yang mempunyai hak untuk memperoleh kedaulatan sebagai warga negara. Dari pengertian tersebut maka

warga negara ialah masyarakat Indonesia, dimana haknya telah terjamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat menunaikan hak-hak masyarakat yang telah terjamin dalam undang-undang melalui suatu kebijakan publik.

Thomas Dye dalam (Subarsono 2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala suatu opsi bagi pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (*public policy is whatever goverments choose to do or not to do*). Model dari Dye tersebut sangatlah luas artinya, karena kebijakan publik berkaitan dengan segala suatu yang pemerintah tidak dapat lakukan, selain yang dapat dilakukan pemerintah seperti adanya masalah publik. Dari definisi tersebut juga dapat berarti bahwa suatu kebijakan publik merupakan kewenangan serta kewajiban bagi pemerintah, oleh karena itu yang dapat membuat kebijakan hanyalah pemerintah itu sendiri, juga dalam kaitannya dengan masalah publik pemerintah bisa untuk mengatasi ataupun tidak mengatasinya.

Berbeda dengan Dye, David Easton dalam (Subarsono 2005:2) berpendapat bahwa suatu kebijakan mengandung nilai-nilai didalamnya, dimana ketika kebijakan dibuat saat itu juga pemerintah memasukan nilai-nilai dalam kebijakannya. Sedangkan Laswell dalam (Erwan dan Dyah 2015:17) mengartikan kebijakan publik terdiri dari beberapa tingkatan, tingkatan tersebut yaitu : agenda setting, perumusan kebijakan, legitimasi, pelaksanaan kebijakan, evaluasi kebijakan, reformulasi, dan terminasi.

Dari berbagai teori menurut beberapa ahli terkait kebijakan publik di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik ialah segala suatu urusan yang

dijalankan oleh pemerintah guna menyelesaikan beragam masalah yang ada dalam masyarakat serta untuk menggapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu yang berperan dalam suatu kebijakan tidak hanya pemerintah saja, namun masih ada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Indonesia, sebenarnya sudah ada beberapa kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah. Kebijakan tersebut yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, kemudian pemerintah juga mengeluarkan suatu kebijakan untuk menjalankan UU tersebut dengan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025. Sedangkan kebijakan di daerah mengenai pengembangan pariwisata, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2027. Kemudian kebijakan selanjutnya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, dimana didalamnya terdapat rencana strategis untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan pariwisata, serta Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Di Kabupaten Semarang. Kemudian dari beberapa kebijakan tersebut, kebijakan terkait dengan pengembangan pariwisata daerah Kabupaten Semarang yakni dengan

dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah sangatlah berperan penting dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah, karena Pemerintah Daerah sebagai pemegang kendali kuasa serta yang mengetahui potensi-potensi di daerah tersebut. Oleh sebab itu dalam kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, maka pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025 menjadi kebijakan yang harus diteliti pelaksanaannya.

1.6.4. Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah langkah utama dalam sebuah proses kebijakan. Karena dalam implementasi kebijakan inilah yang dapat memastikan apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan di lapangan serta berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pressman dan Wildavsky dalam (Erwan dan Dyah 2015:20) memaknai implementasi dengan beberapa kata kunci, yaitu guna menyelenggarakan kebijakan (*to carry out*), guna menunaikan janji-janji politik yang telah di utarakan ke publik (*to fulfill*), untuk menciptakan keluaran kebijakan yang telah disusun dalam tujuan kebijakan (*to produce*), guna menuntaskan misi dari tujuan kebijakan yang telah disusun (*to complete*).

Selain itu pendapat dari Van Meter dan Horn dalam (Erwan dan Dyah 2015:20) yang menafsirkan bahwa implementasi kebijakan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat/publik dan/atau individu/kelompok

yang kemudian ditujukan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu putusan kebijakan. Sedangkan Dwiyanto Indiahono (2009:143) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai bentuk nyata kegiatan melaksanakan kebijakan, baik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah maupun pihak lain yang telah dipilih dalam kebijakan dan terlibat langsung. Dalam implementasi kebijakan terdapat dua kelompok, pertama implementor (pelaksana) dari kebijakan serta kelompok sasaran (obyek kebijakan). Inti utama dalam melaksanakan kebijakan adalah untuk mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya ketika suatu program/kebijakan telah dijalankan. Dari hal tersebut maka akan ada usaha untuk pengadministrasian serta memunculkan dampak yang nyata kepada masyarakat.

Bedasarkan beberapa penjelasan mengenai implementasi kebijakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial pada suatu proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan untuk menjalankan kebijakan/program yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada tahap ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu kebijakan.

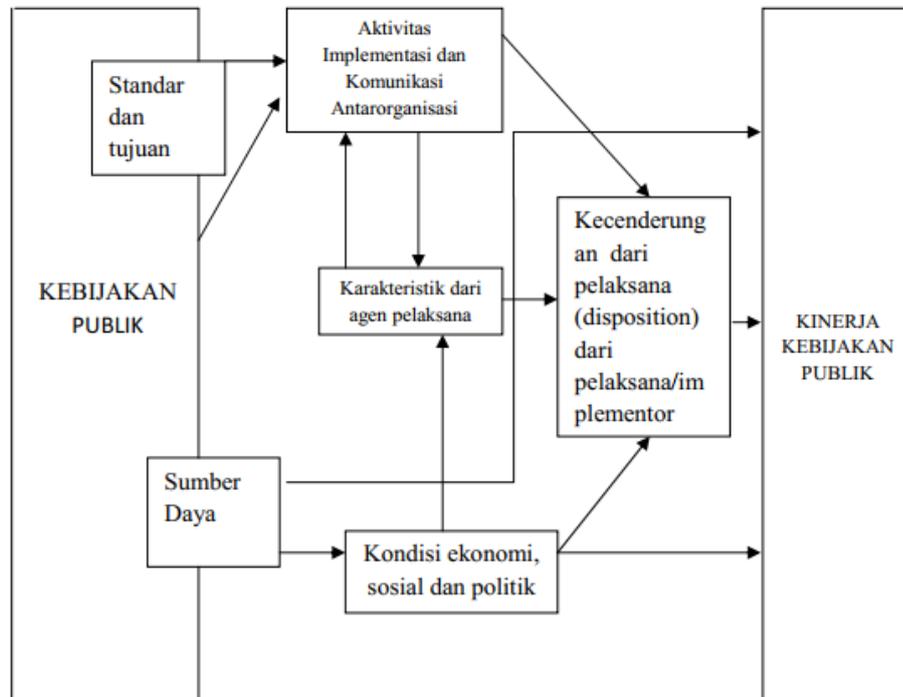
1.6.4.1. Model-Model Implementasi Kebijakan

Sebuah penelitian tentunya harus menggunakan teori yang menjadi acuan dalam meneliti masalah di lapangan. Tiap teori berbeda-beda tujuan dan kegunaannya. Berikut adalah beberapa bentuk implementasi kebijakan menurut berbagai ahli yang sekiranya bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata.

1. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, S., 2014: 242) menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan pelaksana kebijakan dalam menyusun tujuan kebijakan, dimana pendekatan tersebut tergolong kedalam kategori pendekatan *top-down*. Van Horn menyatakan bahwa standar dan tujuan kebijakan harus disampaikan kepada pelaksana melalui jaringan antar organisasi. Dengan kata lain, para pelaksana akan menangkap maksud kebijakan dan setuju dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan.

Teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn merupakan salah satu model kebijakan yang didalamnya terdapat enam indikator. Indikator-indikator tersebut (dalam Mulyadi, 2016:70), yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.



Gambar 1. 1 Model Implementasi Kebijakan Van Metter & Van Horn

Sumber : Van Metter & Van Horn (dalam Anggara, S., 2014: 243)

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan suatu hal yang akan dicapai bagi setiap program atau kebijakn. Menurut Van Metter dan Van Horn menuturkan bahwa identifikasi indikator kinerja ialah sesuatu perihal yang berarti dalam kebijakan publik. Indikator kinerja tersebut bermanfaat guna mengetahui sejauh mana standar serta tujuan kebijakan sudah dicapai.

b. Sumber Daya

Sumber daya ialah komponen penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya sumber daya dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya terkait dengan tersedianya

sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sumber daya lainnya yang mendukung berjalannya pariwisata.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan dipengaruhi pula oleh karakter dari para pelaksana kebijakan itu sendiri (Hura, 2020). Karakter organisasi pelaksana terdiri dari struktur pelaksana kebijakan, siapa saja pihak yang ikut serta dalam implementasi kebijakan tersebut, dan wujud ikatan kerjasama dalam melakukan kebijakan tersebut.

d. Sikap/Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Disposisi dari pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan menjadi salah satu aspek yang memastikan sukses ataupun tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan. Disposisi dari pelaksana berkaitan dengan penerimaan ataupun penolakan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Disposisi pelaksana (dalam Mulyadi 2016:70) mencakup tiga hal penting, yaitu:

- Respon pelaksana terhadap kebijakan, yang nantinya dapat mempengaruhi keinginannya dalam menerapkan suatu kebijakan;
- Kognisi, yaitu terkait pemahaman pelaksana terhadap suatu kebijakan;
- Intensitas disposisi pelaksana, yaitu keinginan yang ingin dilakukan oleh implementor.

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, Anggara (2014:250). Komunikasi dilakukan

untuk menyamakan pandangan dan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat, sehingga akan memunculkan keseragaman dalam bertindak. Komunikasi yang berjalan dengan baik maka akan menjadi faktor pendukung implementasi suatu kebijakan. Begitu juga sebaliknya jika komunikasi berjalan dengan tidak baik, maka akan menjadi faktor penghambat implementasi suatu kebijakan.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi berjalannya implementasi suatu kebijakan. Apabila ketiga faktor tersebut tidak mendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka dapat menjadi sumber masalah yang menghambat jalannya implementasi kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian & Paul Sabatier

Mazmanian & Paul Sabatier beranggapan bahwa pentingnya dilakukan analisis implementasi kebijakan ialah untuk mengetahui serta memaparkan variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dari pelaksanaan suatu kebijakan. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar (dalam Suaib 2016:97), yaitu:

a. Karakteristik Masalah

Hal tersebut terkait dengan kesulitan permasalahan, apakah masalah yang akan dihadapi mudah dikendalikan atau tidak. Selain itu juga berkaitan dengan kemajemukan kelompok sasaran dari suatu program/kebijakan, apakah kelompok sasaran merupakan homogen/setara atautkah kelompok

sasaran yang heterogen/bervariasi. Karena bila ada perbedaan di kelompok sasaran, maka tingkat pemahaman dalam penyampaian program/kebijakan juga berbeda-beda. Kemudian juga berkaitan dengan proporsi kelompok sasaran dan cakupan perubahan kelompok sasaran.

b. Karakteristik Kebijakan

Hal ini berkaitan dengan kejelasan isi kebijakan, sumber daya pendukung pelaksanaan kebijakan, keterikatan dan dukungan berbagai institusi, kejelasan aturan, serta kapasitas pengambil kebijakan untuk merumuskan secara tepat proses pelaksanaannya.

c. Lingkungan Kebijakan

Berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi, suport masyarakat dan pengaruh langsung bermacam variabel-variabel politik terhadap keseimbangan suport masyarakat untuk mencapai tujuan yang terdapat pada keputusan kebijakan tersebut.

Variabel-variabel tersebut mempunyai konsekuensi terhadap pencapaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan. Bagi Mazmanian & Sabatier, sesuatu permasalahan bisa dituntaskan bila permasalahan tersebut tidak susah dikendalikan. Jika permasalahan tersebut susah dikendalikan maka akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan. Mazmanian & Sabatier juga menyampaikan jika variabel politik akan pengaruhi dukungan tujuan yang ada dalam keputusan kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Hogwood & Gunn

Pendekatan implementasi menurut Hogwood & Gunn (dalam Anggara, S., 2014: 246) menyatakan bahwa pentingnya pendekatan *topdown* dalam pelaksanaan

suatu kebijakan, meskipun pendekatan tersebut mendapatkan banyak kritikan. Baginya, pendekatan *bottom-up* yang digunakan pada pelaksanaan kebijakan kasus per kasus tidak akan menarik minat para pembuat kebijakan. Hal tersebut dikarenakan para pembuat kebijakan tersebut merupakan orang-orang yang terpilih secara demokratis, sehingga mereka beranggapan bahwa implementasi bukan sesuatu perihal yang mencederai demokrasi.

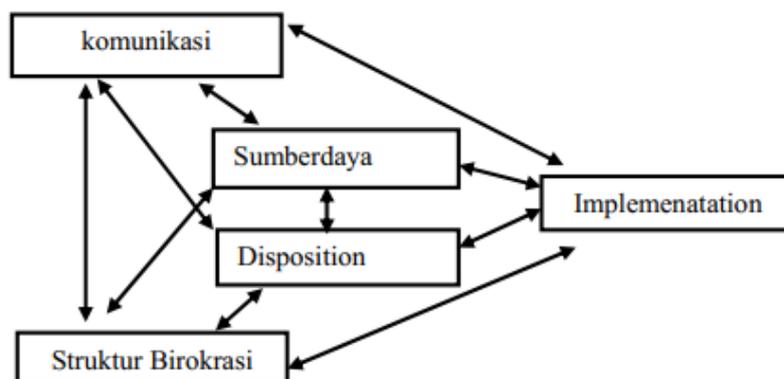
Hogwood dan Gunn memberikan pedoman yang harus disiapkan oleh para pembuat kebijakan, dalam menyusun kebijakan agar bisa berjalan dengan maksimal, antara lain sebagai berikut :

- a. Situasi di luar organisasi tidak terjadi kendala yang dapat menghambat berjalannya kebijakan.
- b. Tercukupinya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
- c. Tidak terjadi kendala yang dapat menghambat penyediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam melaksanakan kebijakan.
- d. Di dalam suatu kebijakan sudah didasarkan pada teori sebab-akibat yang valid.
- e. Hubungan sebab-akibat tersebut sebaiknya bersifat langsung dan tidak terlalu banyak terjadi *intervening variabel*.
- f. Dilaksanakan oleh organisasi tunggal yang tidak ketergantungan dengan organisasi-organisasi lain, namun apabila perlu melibatkan organisasi lain sebaiknya mengurangi ketergantungan pada organisasi lain tersebut.

- g. Harus ada kesepakatan dan pemahaman yang menyeluruh terkait tujuan yang akan dicapai, serta hal ini harus dilakukan dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan.
- h. Untuk mencapai tujuan yang telah disusun, harus mengidentifikasi dengan jelas peran yang harus dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat.
- i. Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang sempurna antar berbagai pihak yang berperan serta dalam pelaksanaan kebijakan.
- j. Pihak yang memiliki kewenangan berhak menuntut dan menerima kepatuhan dari pihak-pihak lain yang terlibat.

4. Model Implementasi Kebijakan C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh C. Edward III (dalam Anggara, S., 2014: 250) menggunakan pendekatan *top down*. Keberhasilan pencapaian implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh 4 aspek yang dapat mempengaruhi berjalannya implementasi kebijakan. Antara lain yakni : komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi.



Gambar 1. 2 Model Implementasi Kebijakan C. Edward III

Sumber : C. Edwards III (dalam Anggara, S., 2014: 250)

a. Komunikasi

Komunikasi mempunyai kedudukan/peran yang cukup berarti dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Salah satu kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan ini, terutama yang terjadi di Indonesia, merupakan permasalahan implementasinya. Salah satu faktornya ialah buruknya komunikasi. Komunikasi yang buruk sesungguhnya tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaannya saja, melainkan terjadi juga pada saat penyusunan kebijakan. Komunikasi seharusnya telah dibentuk ketika perumusan, sehingga suatu nilai yang hendak dicapai dalam suatu kebijakan bisa diketahui serta disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendatang.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut Edwards III, yaitu : 1) Staf, yang memiliki keseimbangan antara kuantitas dan kualitas yang sesuai; 2) Informasi, yaitu berkaitan dengan cara mengimplementasikan suatu kebijakan serta data yang terkait dengan kebijakan yang akan diimplementasikan; 3) Kewenangan. Ialah, kewenangan yang dimiliki oleh pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan. Karena kewenangan yang dibutuhkan oleh pelaksana dapat berbeda tergantung pada kebijakan dan kondisi.; serta 4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Seperti sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh implementor dalam memperlancar proses pelaksanaan

kebijakan. Tanpa dukungan sarana pprasarana, pelaksanaan kebijakan akan tidak efektif.

c. Disposisi

Disposisi dari pelaksana terhadap pelaksanaan suatu kebijakan menjadi salah satu aspek yang memastikan sukses ataupun tidaknya kebijakan tersebut dilaksanakan. Disposisi dari pelaksana berkaitan dengan penerimaan ataupun penolakan dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sebuah prosedur pekerjaan yang dibentuk dengan tujuan mengelola implementasi suatu kebijakan. Kemudian juga perlunya *Standart Operating Procedure (SOP)* yang berguna untuk mengatur sistematika pekerjaan antar para pelaksana, apalagi jika dalam pekerjaan tersebut terlibat berbagai pihak dari institusi lain.

Berdasarkan dari kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam upaya mengembangkan pariwisata daerah, implementasi kebijakan tersebut merupakan tugas dan wewenang dari dinas pariwisata Kabupaten Semarang. Dikarenakan sektor pariwisata merupakan sektor yang dirasa penting bila dilihat dari manfaatnya, salah satunya yakni sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Mengingat saat ini pencapaian dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang belum optimal, dapat dilihat dari data yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas. Kemungkinan dalam proses implementasi kebijakannya, yang dijalankan oleh dinas pariwisata Kabupaten Semarang belum bisa menghasilkan dampak dan manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan kebijakan

pengembangan pariwisata tersebut. Nantinya dalam penelitian ini akan melihat serta menganalisis implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata selaku implementor dari kebijakan tersebut, dengan berlandaskan dari teori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn. Serta juga menganalisis faktor-faktor dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut, seperti melihat faktor yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut.

1.6.5. Pengembangan Pariwisata

Berdasarkan pada pasal 8 ayat 1 dalam UU No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan bahwa perlunya upaya dari pemerintah daerah untuk turut serta dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, melalui rencana induk yang tersinkronisasi dengan rencana induk nasional. Penjelasan tersebut merupakan bukti bahwa pengembangan pariwisata bukan hanya merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat, melainkan juga dari pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya tujuan dari kebijakan tersebut, yang salah satunya ialah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurut KBBI, pengembangan merupakan suatu cara, proses, dan suatu perbuatan mengembankan. Secara umum, pengembangan dapat berarti sebagai suatu proses perubahan dan pertumbuhan, secara perlahan dan bertahap. Sedangkan arti kata pariwisata dalam KBBI ialah Pelancongan atau Turisme yang memiliki makna sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan untuk berekreasi. Sementara menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pariwisata merupakan suatu fasilitas dan layanan yang sebelumnya telah disiapkan

oleh warga setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah serta pengusaha untuk dapat digunakan sebagai kegiatan berwisata atau rekreasi.

Pengertian pariwisata menurut Norval dalam Muljadi dan Nurhayati (200 : 80) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendatang di suatu wilayah, daerah, kota atau negara tertentu yang berkaitan dengan kedatangan, bertempat tinggal, serta segala aktivitas pendatang tersebut di suatu wilayah, daerah, kota atau negara tertentu.

Berdasarkan penjelasan mengenai arti kata pengembangan dan pariwisata di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu proses atau langkah secara bertahap dengan tujuan untuk menciptakan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Pada masa saat ini kebutuhan manusia untuk berwisata sangatlah besar, karena manusia selalu dihadapkan pada pekerjaan yang membuat mereka merasa bosan dan membutuhkan waktu luang untuk dapat istirahat sejenak atau *refreshing* dari segala kesibukan urusan pekerjaan. Oleh karena itu berikut merupakan beberapa faktor yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan pariwisata yang dikemukakan oleh Fandeli (1995:50-51), antara lain yakni : 1) adanya kemauan untuk melepaskan penat dari sibuknya pekerjaan sehari-hari, serta kemuan untuk mengubah keadaan hati dan memanfaatkan hari libur; 2) semakin majunya pembangunan komunikasi dan transportasi; 3) adanya kemauan untuk melihat serta mendapatkan pengalaman baru dari wilayah atau daerah lainnya; 4) semakin besarnya penghasilan seseorang yang kemungkinan menjadi dorongan

seseorang untuk melakukan kunjungan ke suatu wilayah/negara yang jauh dari tempat tinggalnya.

Pariwisata menurut Yoeti (2008:8) semestinya harus bisa memenuhi 4 kriteria sebagai berikut, yakni:

- 1) Merupakan suatu aktivitas bepergian yang dilakukan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, dimana kegiatan bepergian tersebut dilakukan di luar wilayah tempat tinggal seseorang;
- 2) Perjalanan yang dilakukan hanya bertujuan untuk bersenang-senang, bukan untuk mencari keuntungan di wilayah, daerah, atau negara yang menjadi tujuan perjalanan;
- 3) Kegiatan berbelanja yang dilakukan wisatawan adalah menggunakan uang yang sebelumnya telah dibawa dan dimiliki, bukannya didapat ketika sedang dalam perjalanan menuju tempat wisata; dan
- 4) Perjalanan yang ditempuh setidaknya dilakukan selama 24 jam atau lebih.

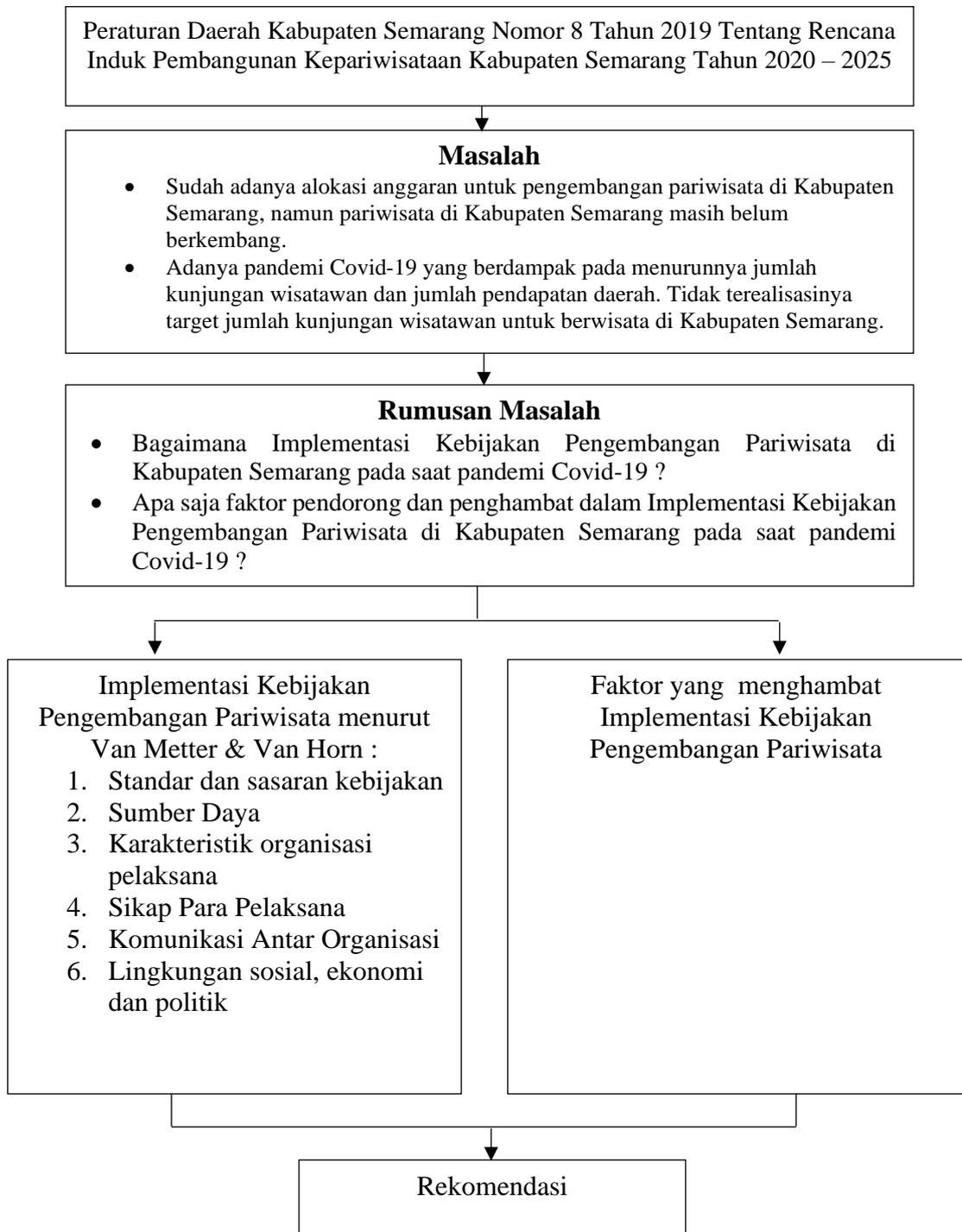
Selain kriteria tersebut, terdapat 5 hal penting yang menjadi dasar dilakukannya aktivitas pariwisata, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan wisata yang dilakukan dengan tanggung jawab, yakni segala kegiatan yang dilakukan wisatawan di suatu wilayah, daerah, negara harus bertanggung jawab pada akibat yang dihasilkan dari kegiatan berwisata terhadap lingkungan alam dan budaya sekitar;
2. Kunjungan wisata dilakukan menuju dan/atau pada daerah yang masih asri (*nature made*) atau menuju dan/atau pada daerah yang diselenggarakan atas dasar konservasi alam;

3. Tujuan berwisata juga untuk mendapatkan pembelajaran dan pemahaman tentang berbagai fenomena alam serta budaya yang ada di suatu daerah, sehingga tidak hanya untuk bisa menikmati pesona alamnya saja;
4. Kegiatan berwisata dapat mempersembahkan bantuan dalam upaya pelestarian alam.
5. Kegiatan pariwisata dapat bermanfaat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pariwisata, terutama mengenai kriteria yang harus dipenuhi dalam berwisata di atas, menjadikan sebuah pekerjaan rumah bagi pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Selain menyediakan obyek pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan, juga perlu menyediakan infrastruktur dan fasilitas penunjang lainnya, seperti akses menuju lokasi wisata, tempat penginapan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan berwisata. Sehingga segala aktivitas wisatawan selama berwisata di Kabupaten Semarang akan menjadi lebih mudah, dan wisatawan merasa nyaman, serta dapat meningkatkan minat wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Semarang. Upaya tersebut yakni dengan melaksanakan kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Semarang, yang akan dikaji dalam penelitian ini.

1.6.6. Kerangka Berpikir



Gambar 1.3 Kerangka Berpikir

Sumber: Analisa peneliti, 2022

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan sebuah ilmu/studi yang mempelajari tentang segala urusan organisasi, yang dijalankan oleh manusia dan dibantu dengan berbagai peralatan penunjang yang kemudian bisa diterapkan dalam pemerintahan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu administrasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam segala aktivitas organisasi. Dengan adanya administrasi maka sebuah organisasi dapat menjalankan segala aktivitasnya untuk dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti halnya pada negara Indonesia yang merupakan suatu organisasi besar, maka organisasi tersebut perlu dikelola melalui berbagai kegiatan administrasi, dimana kendali dipegang oleh pemerintah. Maka administrasi disini berperan untuk mencapai tujuan negara, yang salah satunya yaitu untuk mensejahterakan rakyat dengan melalui kebijakan.

1.7.2. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah segala suatu urusan yang dijalankan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di sekitar masyarakat serta untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu pihak yang berperan dalam suatu kebijakan tidak hanya pemerintah saja, namun ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan.

1.7.3. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan

untuk menjalankan kebijakan/program yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada tahap ini dapat mempengaruhi hasil akhir dari suatu kebijakan.

Berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Semarang dalam upaya mengembangkan pariwisata daerah, implementasi kebijakan tersebut merupakan tugas dan wewenang dari dinas pariwisata Kabupaten Semarang. Dikarenakan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dirasa penting bila dilihat dari manfaatnya, seperti sebagai pendongkrak pendapatan daerah. Mengingat saat ini pencapaian dari pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang belum optimal, dapat dilihat dari data yang telah dijelaskan di atas. Kemungkinan dalam proses implementasi kebijakannya, yang dijalankan oleh dinas pariwisata Kabupaten Semarang belum bisa menghasilkan dampak dan manfaat yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan pengembangan pariwisata tersebut. Nantinya dalam penelitian ini akan melihat serta menganalisis implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh dinas pariwisata selaku implementor dari kebijakan tersebut, dengan berlandaskan dari teori implementasi kebijakan Van Metter & Van Horn. Serta juga menganalisis faktor-faktor dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut, seperti melihat faktor pendorong maupun faktor yang menghambat berjalannya implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tersebut.

1.7.4. Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu proses atau langkah secara bertahap dengan tujuan untuk menciptakan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

1.8. Operasionalisasi Konsep

Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang pada obyek wisata Palagan Ambarawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata merupakan sebuah usaha untuk menjalankan dan melaksanakan kebijakan terkait pariwisata yang telah dikeluarkan sebelumnya, agar pariwisata di daerah tersebut dapat semakin berkembang. Dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut terdapat beberapa fenomena yang dapat dilihat, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
 - a. Pedoman Kebijakan Pengembangan Pariwisata;
 - b. Tujuan/Sasaran Kebijakan Pengembangan Pariwisata;
 - c. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggalnya;
 - d. Meningkatnya pendapatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata; dan

- f. Langkah Dinas dalam menjalankan kebijakan pada masa Pandemi Covid-19.
2. Sumber Daya
 - a. Kualitas dan kuantitas implementor dalam menjalankan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang;
 - b. Penyediaan anggaran dalam pengembangan pariwisata; dan
 - c. Penyediaan sarana prasarana umum dalam memenuhi kebutuhan wisatawan.
 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
 - a. Struktur pelaksana kebijakan dan hubungan kerjasama antar pelaksana;
 - b. Peran dari setiap pelaksana yang terlibat.
 4. Sikap Para Pelaksana
 - a. Sikap pelaksana dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata;
 - b. Respon pelaksana dalam menjalankan instruksi pengembangan pariwisata.
 5. Komunikasi Antar Organisasi
 - a. Sosialisasi kebijakan pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa kepada pengelola pariwisata/UPTD;
 - b. Koordinasi antara pelaksana dengan kelompok kepentingan serta pengelola pariwisata/UPTD dalam pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa.
 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

- a. Dukungan kelompok kepentingan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang;
- b. Respon masyarakat terhadap pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang;

Faktor-Faktor Implementasi Pengembangan Pariwisata

Proses implementasi kebijakan pengembangan pariwisata tentu terdapat faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, di dalam penelitian implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa hanya akan mengetahui faktor yang menghambat implementasi kebijakan.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, secara analisis deskriptif berarti memiliki keterkaitan dengan data untuk variabel suatu penelitian. Istilah penelitian kualitatif ini pertama kali diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:3) yang mengartikan metodologi kualitatif merupakan suatu langkah penelitian yang nantinya akan mendapatkan data berupa gambaran atau penjelasan seperti perkataan dari beberapa orang serta tingkah laku yang dapat diamati. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang melingkupi unit khusus, memberikan gambaran yang jelas dan mendalam, berkaitan dengan kehidupan nyata, serta dapat menjawab pertanyaan terkait dengan masalah.

Sehingga penelitian deskriptif secara analitis berkaitan dengan permasalahan yang ada saat melaksanakan penelitian di lapangan, karakter dari deskriptif yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai temuan dilapangan dapat digunakan dan diolah sebagai hasil penelitian

1.9.2. Situs Penelitian

Situs bersangkutan dengan lokus atau tempat akan dilaksanakannya penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil lokus atau tempat penelitian di Ungaran, yang merupakan lokasi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Selain itu juga di obyek wisata Palagan Ambarawa sebagai obyek wisata yang akan diteliti pengembangannya.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek utama dalam penelitian ini adalah perseorangan dan/atau kelompok-kelompok yang memiliki kaitan dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan yang diketahui mengenai permasalahan penelitian. Peneliti mengharapkan informasi yang didapatkan langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, Pengelola Pariwisata dan Pengunjung wisata.

Mengenai penentuan subjek dalam penelitian ini, peneliti akan memakai teknik *Purposive Sampling*, dimana teknik tersebut menggunakan ciri-ciri tertentu yang terdapat pada subjek penelitian yang dipilih, karena dari ciri-ciri tersebutlah yang sinkron dengan tujuan penelitian ini. Subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain yakni sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata
2. Kepala UPTD Dinas Pariwisata
3. Koordinator Lapangan Palagan Ambarawa
4. Pelaku usaha
5. Masyarakat/Wisatawan lokal

1.9.4. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis data yang akan digunakan untuk menunjang penelitian, seperti teks/naskah, data yang berupa angka, perkataan tertulis, serta hasil dokumentasi/foto. Berikut merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Data primer merupakan data yang cara mendapatkannya bersumber langsung dari informan/subjek penelitian yang paham, berhak dan berwenang untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan cara untuk mendapatkan sumber data ini adalah dengan melalui wawancara secara langsung dan mendalam (*indepth interview*) terhadap narasumber yang paham dan mengetahui permasalahan penelitian.
- b. Data sekunder merupakan data yang cara memperolehnya melalui berbagai sumber kedua atau dengan kata lain didapatkan dari berbagai laporan terkait dengan permasalahan penelitian, penelitian dengan fokus permasalahan yang sama yang telah dilakukan sebelumnya, serta dokumen-dokumen yang bisa diakses melalui website terkait. Selain itu sumber data dalam penelitian ini juga didapatkan dari berbagai arsip, data ataupun dokumen resmi yang didapatkan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, serta dinas-dinas terkait lainnya.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpul data adalah tahapan yang paling penting dan vital dalam suatu penelitian, karena penelitian yang dilakukan adalah bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan topik penelitian. Tanpa memahami teknik-teknik pengumpul data, akibatnya peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Ahyar et al., 2020 : 120).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data/informasi yang akan digunakan antara lain sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan. Yakni dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data dari informan di Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang serta melakukan pengamatan langsung di lingkungan sekitar lokasi obyek pariwisata Palagan Ambarawa. Karena peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan, maka data yang diperoleh merupakan data yang sesuai dengan keadaan serta dapat menggambarkan keadaan sekitar mengenai Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan bertemunya dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide dengan melalui tanya jawab. Terdapat dua cara yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk melakukan wawancara, antara lain yakni wawancara secara langsung/berhadapan (*face to face interview*) dengan informan dan wawancara melalui media telekomunikasi. Dengan melakukan wawancara, peneliti akan memperoleh data serta informasi terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang Pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi yang dapat diakses publik, seperti

makalah, koran, laporan dinas, maupun dokumen khusus, seperti surat, *e mail*, buku harian, dll. Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi dengan foto dan rekaman suara saat berada di lapangan. Selain itu peneliti akan berhadapan dengan ketersediaan dokumen resmi yang sesuai dengan permasalahan dan dibutuhkan dalam mendapatkan informasi. Yakni dokumen laporan maupun kebijakan/peraturan yang terkait dengan pariwisata yang dibuat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.

1.9.6. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu tahapan menemukan serta merangkai data secara sistematis yang sebelumnya didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti, dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain Bogdan dalam (Ahyar et al., 2020 : 161).

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Spradley (dalam Sugiyono, 2016:253), yang kemudian dibagi menjadi empat tahapan. Tahapan analisis data tersebut antara lain yakni sebagai berikut :

1. Pertama, analisis domain yaitu pemahaman yang menyeluruh tentang objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan rinci, peneliti dapat menemukan kategori atau bidang tertentu sebagai dasar penelitian selanjutnya. Semakin banyak domain yang dipilih, semakin lama penelitian akan dilakukan. Data diperoleh dari pemantauan. Hasilnya adalah gambaran umum dari subjek penelitian yang sebelumnya tidak diketahui. Melalui analisis ini, informasi yang diperoleh tidak mendalam dan masih

dangkal, tetapi domain atau kategori situasi sosial yang diteliti telah ditemukan.

2. Kedua, menentukan analisis struktur taksonomi, yaitu mendeskripsikan domain yang dipilih secara lebih rinci untuk menentukan struktur internalnya. Pengamatan kunci lengkap. Analisis didasarkan pada keseluruhan data yang dikumpulkan dalam domain yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis taksonomi ini dapat digunakan untuk menganalisis bidang yang lebih rinci dan mendalam yang diidentifikasi oleh peneliti sebagai istilah penutup.
3. Ketiga, analisis komponensial yaitu analisis dilaksanakan sebagai observasi, dan wawancara dengan pertanyaan yang berlawanan dipilih. Pada analisis komparatif, bukan persamaan dalam domain yang berusaha untuk diatur dalam domain tersebut, tetapi domain dengan perbedaan atau kontras. Menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi untuk mencari data ini melalui observasi, wawancara, dan dokumen terpilih, maka dapat ditemukan bahwa terdapat banyak dimensi khusus yang berbeda di setiap aspek.
4. Keempat, analisis tema kultural yaitu menemukan keterkaitan antara bidang-bidang dan keterkaitannya dengan keseluruhan, dan menjelaskan lebih lanjut dalam tema atau judul penelitian. Menurut analisis budaya ini, jika judul proposal berubah setelah peneliti masuk ke lapangan, maka judul penelitian baru dapat dibuat.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis domain dan taksonomi dalam menganalisis data yang didapatkan di lapangan. Spradley (dalam Sugiyono, 2016:256), menyatakan bahwa analisis domain dilakukan guna mendapat gambaran secara umum serta menyeluruh mengenai obyek penelitian. Pada analisis domain ini nantinya data akan dikategorikan berdasarkan berbagai kategori sesuai dengan fenomena penelitian yang diamati.

1.9.7. Kualitas Data

Sugiyono (2012:267) mengemukakan bahwa penilaian keaslian data dalam kegiatan penelitian lebih fokus kepada uji validitas dan reliabilitas. Namun terdapat salah satu teknik untuk menguji keabsahan data yakni melalui teknik triangulasi. Menurut Sugiyono (2012:274) menguraikan tiga jenis teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, teknis dan waktu.

1. Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan untuk mengecek keabsahan data melalui sumber lain yang telah memperoleh data sebelumnya.
2. Triangulasi teknis yakni pengujian keabsahan data dengan melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama dengan metode/ teknis yang tidak sama. Misalnya mengecek data hasil dengan observasi, wawancara dokumentasi.
3. Triangulasi waktu, adalah menguji keabsahan data yang diperoleh dalam waktu yang tidak sama. Contohnya menguji data dari narasumber yang sama dalam waktu yang berbeda.